**ABSTRAK**

Penetapan upah minimum merupakan bentuk upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas sistem pembayaran upah bagi para karyawan atau buruh. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selaku motor penggerak dalam proses penetapan upah di suatu daerah, termasuk di provinsi Sulawesi Selatan memiliki peranan penting dalam mewujudkan sistem penggajian atau pemberian upah yang menjunjung tinggi kesetaraan hak dan keadilan. Melihat pentingnya peranan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tersebut, penulis mengambil judul, yakni “Peranan Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi dalam Proses Penetapan Upah Minimum Provinsi.

Berdasarkan teori peranan dari Mintzberg bahwa dimensi peranan terdiri dari peranan antarpribadi, peranan yang berhubungan dengan informasi, dan peranan pengambil keputusan, untuk mengetahui seberapa besar peranan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam proses penetapan upah minimum provinsi, dilakukan penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif yang dilakukan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan induktif, selanjutnya dalam pengumpulan data, digunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi. Analisis data diantaranya, mereduksi data, menyajikan data, dan menentukan kesimpulan.

Peranan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menentukan upah minimum provinsi sudah dianggap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian perbedaan pendapat dari pihak pengusaha dan buruh masih sering terjadi, buruh merasa upah minimum tidak sesuai dengan daya beli saat ini. Kepala Dinas harus mengusulkan kembali tentang kenaikan upah minimum provinsi dan disesuaikan dengan daya beli masyarakat. Kepala Dinas harus meninjau kembali kebutuhan hidup layak pekerja yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan.

Kata Kunci : Peranan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Upah